

**PANCASILA
DAN
HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA**

Oleh : G. Seto Harianto/04042016



PENEGASAN IR. SOEKARNO

1 Juni 1945

- ❖ *“Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, Filosofische grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan ‘gedung Indonesia Merdeka’ yang kekal abadi”.*

MAKNA PANCASILA

- ▶ SEPERANGKAT RANGKAIAN NILAI FILOSOFIS YANG SECARA HOLISTIK MEMBENTUK GAGASAN DASAR BERUPA KONSEP DAN PRINSIP DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA YANG DISEBUT SEBAGAI PANDANGAN HIDUP.

RUMUSAN 1 JUNI 1945

- ▶ I. KEBANGSAAN INDONESIA
- ▶ II. INTERNASIONALISME, ATAU PERIKEMANUSIAAN
- ▶ III. MUFAKAT, ATAU DEMOKRASI
- ▶ IV. KESEJAHTERAAN SOSIAL
- ▶ V. KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN.

ALTERNATIF ...

- ❖ BILA HANYA 3 (TIGA) :
 - ▶ *SOCIO-NATIONALISME*,
 - ▶ *SOCIO-DEMOKRASI*, DAN
 - ▶ KETUHANAN.

- ❖ BILA HANYA SATU :
GOTONG ROYONG

RUMUSAN 22 JUNI 1945

- ▶ KE-TUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA, MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN-PERWAKILAN SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

RUMUSAN 18 AGUSTUS 1945

- ▶ KE-TUHANAN YANG MAHA ESA,
- ▶ KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,
 - ▶ PERSATUAN INDONESIA, DAN
 - ▶ KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN-PERWAKILAN
- ▶ SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

IMPLEMENTASI PANCASILA

❖ PANCASILA DIIMPLEMENTASIKAN
DALAM TIGA FUNGSI UTAMA,
YAITU :

- FUNGSI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP,
- FUNGSI SEBAGAI DASAR NEGARA,
- FUNGSI SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.

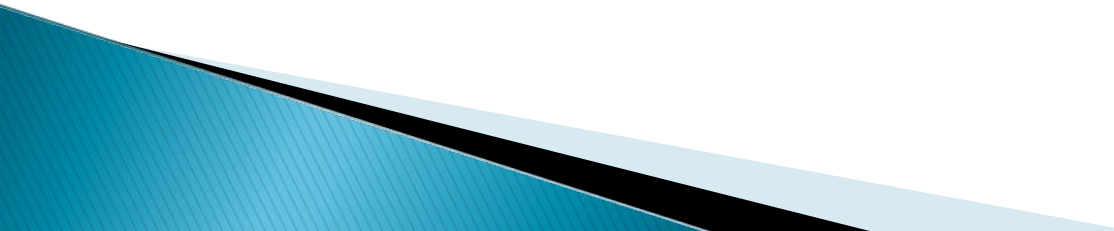
AKTUALISASI PANCASILA

- ❖ FUNGSI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DIAKTUALISASIKAN DALAM WUJUD NILAI DAN NORMA YANG MENDASARI POLA PIKIR, POLA SIKAP, DAN PERILAKU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.
- ❖ FUNGSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DIAKTUALISASIKAN DALAM WUJUD PASAL DAN AYAT UUD 1945.

Lanjutan ...

- ▶ FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL DIAKTUALISASIKAN DALAM WUJUD PRINSIP DAN NORMA PEMBANGUNAN YG MENCAKUP BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SERTA PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

FILSAFAT PANCASILA

- ❖ MELIPUTI FILSAFAT KETUHANAN, FILSAFAT KEMANUSIAAN, FILSAFAT KEBANGSAAN, FILSAFAT KEDAULATAN RAKYAT, DAN FILSAFAT KEADILAN SOSIAL.
 - ❖ MEWUJUD DALAM BERBAGAI KONSEP DAN PRINSIP BERNEGARA
- 

FILSAFAT KETUHANAN

- ▶ FILSAFAT KETUHANAN MEWUJUD DALAM KONSEP RELIGIUSITAS YANG MELAHIRKAN PRINSIP KETUHANAN YANG MAHA ESA.

FILSAFAT KEMANUSIAAN

- ▶ **MEWUJUD DALAM KONSEP HUMANITAS YANG MELAHIRKAN PRINSIP KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

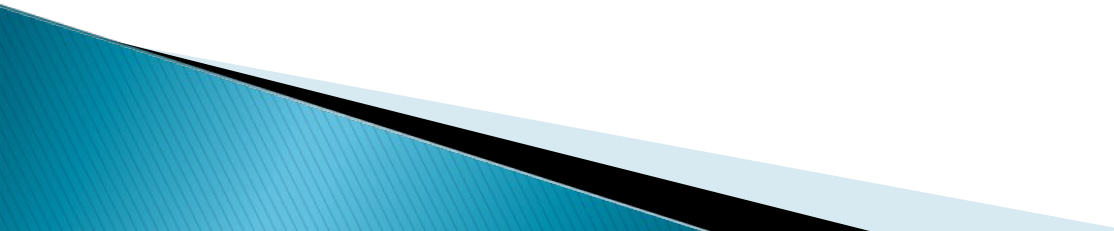
FILSAFAT KEBANGSAAN

- ▶ MEWUJUD DALAM KONSEP NASIONALITAS ATAU KEBANGSAAN YANG MELAHIRKAN PRINSIP PERSATUAN INDONESIA.

FILSAFAT KEDAULATAN RAKYAT

- ▶ **MEWUJUD DALAM KONSEP
DEMOKRASI YANG MELAHIRKAN
PRINSIP KERAKYATAN YANG
DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN**

FILSAFAT KEADILAN SOSIAL

- ▶ **MEWUJUD DALAM KONSEP
KEADILAN SOSIAL YANG
MELAHIRKAN PRINSIP KEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA.**
- 

KONSEP

- ❖ KONSEP YANG DIMAKSUD DI SINI IALAH GAGASAN DASAR YG BERSIFAT ABSTRAK, UMUM DAN UNIVERSAL YANG MERUPAKAN HASIL OLAH PIKIR MANUSIA SECARA ANALITIK, KRITIS, LOGIS, REFLEKTIF, RADIKAL DAN INTEGRAL; BERUPA DALIL UNTUK MEMBERIKAN MAKNA DAN ACUAN KRITIK TERHADAP FENOMA YG DIHADAPINYA.

KONSEP RELIGIUSITAS

- ▶ MENEGASKAN PENGAKUAN BANGSA INDONESIA AKAN KONSEP UNIVERSAL TENTANG ADANYA KEKUATAN GAIB YANG MENJADIKAN ALAM SEMESTA BESERTA SEGALA ISINYA, TERMASUK MANUSIA.
- ▶ BANGSA INDONESIA MENYEBUTNYA SEBAGAI TUHAN YANG MAHA ESA.

Lanjutan ...

- ▶ DALAM KONSEP RELIGIUSITAS DITEGASKAN BAHWA MANUSIA DICIPTAKAN OLEH TUHAN YME SEBAGAI MAKHLUK TERMULIA DI ANTARA CIPTAANNYA.
- ▶ MANUSIA DICIPTAKAN SEBAGAI MAKHLUK PRIBADI SEKALIGUS MAKHLUK SOSIAL YANG DIANUGERAHI AKAL BUDI DAN KEHENDAK YANG BEBAS.

KONSEP HUMANITAS

- ▶ MENEGASKAN PENGAKUAN BANGSA INDONESIA AKAN KONSEP UNIVERSAL BAHWA SEBAGAI SESAMA MAKHLUK CIPTAAN TUHAN YME MANUSIA SESUAI DENGAN KODRATNYA MEMILIKI KESETARAAN SATU SAMA LAINNYA.
- ▶ BUNG KARNO JUGA MENGGUNAKAN ISTILAH INTERNASIONALISME.

KONSEP NASIONALITAS

- ▶ MENEGASKAN BAHWA INTERNASIONALISME YANG DIANUT BANGSA INDONESIA BUKAN DALAM ARTI KOSMOPOLITISME YANG MENGABAIKAN EKSISTENSI KEBANGSAAN.
 - ▶ SETIDAKNYA ADA DUA PANDANGAN TENTANG TERBENTUKNYA SUATU BANGSA. ERNEST RENAN MENEKANKAN PADA PERSAMAAN ASAL USUL ATAU SUKU BANGSA, OTTO V. BAUER MENGGARISBAWAHI ALASAN PERSAMAAN NASIB.

KONSEP SOVERENITAS

- ▶ MENEGASKAN PENGAKUAN BANGSA INDONESIA AKAN KONSEP UNIVERSAL BAHWA KEDAULATAN PADA DASARNYA MEMANG BERADA DI TANGAN RAKYAT, AKAN TETAPI DIEJAWANTAHKAN DEMI PERWUJUDAN CITA-CITA RAKYAT YANG LUHUR.
- ▶ AKTUALISASI KEDAULATAN RAKYAT TIDAK BEBAS NILAI.

KONSEP KEADILAN SOSIAL

- ▶ MENEGASKAN PENGAKUAN BANGSA INDONESIA AKAN KONSEP UNIVERSAL BAHWA KEADILAN BUKAN DALAM ARTI SAMA RATA, AKAN TETAPI MENEMPATKAN SETIAP ORANG BERBEDA SEBANDING ATAU SETARA DENGAN PERBEDAAN DAN KEUNIKAN Masing-Masing.

PRINSIP

- ▶ PRINSIP YANG DIMAKSUD DI SINI IALAH SUATU HAL IHWAL YANG MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI SUATU KONSEP
- ▶ YANG BERUPA DALIL ATAU AXIOMA ATAU PROPOSISI AWAL YANG BERSIFAT HOLISTIK
 - ▶ DIJADIKAN DOKTRIN, ASUMSI ATAU LANDASAN DALAM BERPIKIR, BERSIKAP DAN BERTINGKAH LAKU (CIPTA, RASA, KARSA, DAN KARYA).

PRINSIP KETUHANAN YANG MAHA ESA

- ▶ **KONSEP RELIGIUSITAS MELAHIRKAN PRINSIP KETUHANAN YME.**
 - ▶ **MENEGASKAN BAHWA BANGSA INDONESIA BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME.**
- ▶ **KEIMANAN DAN KETAQWAAN BANGSA INDONESIA PADA TUHAN YME DIEJAWANTAHKAN SELAIN MELALUI AGAMA-AGAMA, DAPAT PULA MELALUI BENTUK PENGORGANISASIAN KEYAKINAN LAINNYA.**

Lanjutan ...

- ▶ SETIAP WARGA NEGARA BEBAS MEMILIH AGAMA ATAU KEPERCAYAAN YANG DIYAKININYA, DAN TIDAK BOLEH MEMAKSAKAN KEYAKINANNYA KEPADA ORANG LAIN BAHKAN HARUS SALING HORMAT MENGHORMATI.
- ▶ KARENA ITU SETIAP WARGA NEGARA BEBAS BERIBADAT MENURUT AGAMANYA ATAU KEPERCAYAANNYA MASING-MASING DAN NEGARA WAJIB MENJAMIN KEBEBASAN SETIAP WARGA NEGARA UNTUK BERIBADAT MENURUT AGAMANYA ATAU KEPERCAYAANNYA ITU.

PRINSIP KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

- ▶ **MENEGASKAN BAHWA BANGSA INDONESIA MEYAKINI DAN MENGHORMATI KODRAT, HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK CIPTAAN TUHAN YME YANG DIANUGERAHI AKAL BUDI DAN KEHENDAK BEBAS.**
- ▶ **MENEMPATKAN KEUNIKAN DAN KEPELBAGAIAN MANUSIA, WARGA BANGSA, SBG KEKAYAAN.**

Lanjutan...

- ▶ DENGAN DEMIKIAN BANGSA INDONESIA JUGA MERASA SENASIB SEPENANGGUNGAN.
- ▶ OLEH KARENA ITU BANGSA DAN NEGARA INDONESIA MENDUKUNG DAN TURUT SERTA MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA, YANG DIATUR DAN DITERAPKAN SESUAI HAKIKAT DAN JATIDIRI BANGSA INDONESIA.

PRINSIP PERSATUAN INDONESIA

- ▶ MENEGASKAN BAHWA KEBAHAGIAAN HIDUP HANYA AKAN DICAPAI MELALUI PERSATUAN DALAM NEGARA INDONESIA.
- ▶ JUGA MENEGASKAN KEYAKINAN BANGSA INDONESIA AKAN PLURALITASNYA DAN DITUANGKAN DALAM SESANTI *BHINNEKA TUNGGAL IKA*.
- ▶ MEWUJUD DALAM SATU WAWASAN KEBANGSAAN YAITU WAWASAN NUSANTARA.

PRINSIP KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH

- ▶ MENEGASKAN BAHWA DEMOKRASI YANG DIANUT BANGSA INDONESIA BUKANLAH DEMOKRASI YANG BERTUMPU PADA PRINSIP *ONE MAN ONE VOTE*, KARENA PRINSIP TERSEBUT CENDERUNG MELAHIRKAN *NATURAL SELECTION* DAN *SURVIVAL OF THE FITTEST*.

Lanjutan ...

- INDONESIA MENGANUT PAHAM KONSTITUSIONAL & PRINSIP NEGARA HUKUM
- DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA CIRI-CIRI NEGARA HUKUM MELIPUTI PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBAGIAN KEKUASAAN, PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN ADANYA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.



Lanjutan ...

- ▶ SEGALA PERMASALAHAN DAN ASPIRASI RAKYAT, UTAMANYA YANG MENYANGKUT HAK SIPIL, HAK POLITIK, HAK EKONOMI, HAK SOSIAL, DAN HAK BUDAYA, SERTA HAK KEAMANAN DIMUSYAWARAHKAN OLEH WAKIL-WAKIL RAKYAT DALAM LEMBAGA-LEMBAGA PERWAKILAN

Lanjutan ...

- ▶ DENGAN DEMIKIAN PRINSIP INI JUGA MENOLAK 'DOMINASI MAYORITAS' MAUPUN 'TIRANI MINORITAS' DEMI TERWUJUDNYA *SOCIALE RECHTVAARDIGHEID* ATAU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

PRINSIP KEADILAN SOSIAL...

- ▶ MENEGASKAN BAHWA PADA GILIRANNYA YANG HENDAK DICAPAI ADALAH KESEJAHTERAAN LAHIR-BATIN BAGI SEMUA.
- ▶ KEEMPAT PRINSIP LAINNYA BERMUARA DAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN 'SEMUA BUAT SEMUA'
 - ▶ SECARA ADIL DAN MERATA

ADIL DAN MERATA

- ❖ UKURANNYA IALAH BAHWA SETIAP ORANG WARGA NEGARA HARUS HIDUP LAYAK SESUAI KEMANUSIAAN DAN SESUAI DENGAN DARMA BAKTINYA YANG DIBERIKANNYA KEPADA BANGSA DAN NEGARA.
- ❖ KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERSAMA MENEGARA DIWUJUDKAN MELALUI BENTUK NEGARA HUKUM (*RECHTSSTAAT*) DAN BUKAN NEGARA YANG ATAS KEKUASAAN BELAKA (*MACHTSSTAAT*).

HAK KONSTITUSIONAL WNI

- ▶ **ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UUD 1945.**
- ▶ **MELIPUTI HAK SIPIL, HAK POLITIK, HAK EKONOMI, HAK SOSIAL, DAN HAK BUDAYA, SERTA HAK PERTAHANAN DAN KEAMANAN.**

MAKNA KEBEBASAN

- ▶ KEBEBASAN BAGI BANGSA INDONESIA BUKAN SEKEDAR BEBAS DARI PENJAJAHAN, TETAPI BEBAS UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA RAKYAT YANG LUHUR, YAITU CITA-CITA KEMERDEKAAN, SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945.

Lanjutan ...

- ▶ OLEH KARENA ITU DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PANCASILA YG BERSIFAT HOLISTIK MAKA HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA HARUS DIPAHAMI SEBAGAI KESATUAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN.
- ▶ DENGAN DEMIKIAN PASAL DAN AYAT HAM YANG DIMUAT DALAM PASAL 28A – 28J UUD 1945 DALAM DIRINYA MEMMUAT JUGA KEWAJIBAN ASASI.

PASAL 28J, KHUSUSNYA AYAT (2)

❖ *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

- ❖ MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMULIHKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DILANGGAR ATAU DIKURANGI OLEH KARENA BERLAKUNYA SUATU UNDANG-UNDANG.
- ❖ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK *ME-REVIEW* UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 SEKALIGUS MENEMPATKANNYA SEBAGAI *THE GUIDANCE OF THE CONSTITUTION*.

Lanjutan ...

- ▶ GUNA MENJAGA DAN MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DARI KESEWENANGAN KEBIJAKAN DAN/ATAU PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA DIBENTUK PERADILAN TATA USAHA NEGARA.



gesetoha@gmail.com